



Buletin

Parlamentaria



Tok! UU Desa Sah



3 Desak Negara Adidaya Dukung Palestina Merdeka



4 Jelang Pilkada, TNI Diharapkan Jaga Netralitas

Nomor 1287/I/IV/2024 • April 2024



9 772614 339005



Tok! UU Desa Sah

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

"Selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? setuju ya," tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Paripurna.

Pertanyaan Puan tersebut lalu disambut 'Setuju' oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Yang kemudian disusul penyampaian pandangan akhir soal RUU Desa oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Wakil Ketua Baleg DPR RI

Achmad Baidowi mengungkapkan salah satu poin krusial yang disepakati yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas terlebih

”

SELANJUTNYA KAMI AKAN MENANYAKAN KE SETIAP FRAKSI APAKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAPAT DISETUJUI UNTUK DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG? SETUJU YA,

dahulu menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Dalam laporan ini terdapat beberapa poin perubahan dalam UU tersebut. Di antaranya penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, ketentuan pasal 26, 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

"Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Keenam, ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang," lanjut Supratman.

we/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima pandangan akhir soal RUU Desa oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Desak Negara Adidaya Dukung Palestina Merdeka



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat mengikuti Sidang IPU ke 148 di Jenewa, Switzerland.

FOTO: DDY/PDT

DPR RI memastikan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus dilakukan secara konsisten terutama melalui forum-forum internasional, seperti dalam sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Peran parlemen dinilai bisa menjadi ujung tombak dalam menghentikan eskalasi peperangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di Jenewa, Swiss mendesak negara-negara besar (adidaya) di dunia untuk menggunakan pengaruhnya dalam membuka jalan kemanusiaan kepada jutaan warga di Gaza, Palestina.

"Kita semua yang ada di ruangan

ini tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan warga sipil di Gaza. Karena itu, saya mengajak kepada negara-negara besar di dunia, tolong gunakan pengaruh anda untuk mengembalikan kemanusiaan dan menghentikan peperangan," ujar Puan di Jenewa, Minggu (24/3).

"Parlemen harus memimpin dan memberi contoh dalam memperjuangkan 3 pilar perdamaian. Bukan sebaliknya, mengambil tindakan sepihak atau malah menciptakan pertengkaran. Diplomasi parlemen perlu lebih banyak kerja sama antarnegara," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. **tv/rdn**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danurtito, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonmaricha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alficon Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Sihahan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Jelang Pilkada, TNI Diharapkan Jaga Netralitas

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan, Rabu (27/11) mendatang, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjaga netralitasnya. Terlebih, pelaksanaan Pilkada berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

"Kami dalam hal ini meminta untuk TNI bersikap bersifat netral, tidak menggunakan kekuatan-kekuatan untuk membela ataupun mendukung salah satu calon," kata Nurul Arifin dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Nurul Arifin mengatakan potensi konflik horizontal memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini melihat skala Pilkada lebih mikro

dibanding dengan Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pemilu (Pemilihan Umum). "Dalam skala mikro tersebut kita tahu bahwa pertarungan terjadi di wilayah, baik di kota/provinsi/kabupaten dan ini memungkinkan antar saudara di situ bisa berperang, bisa berkonflik karena perbedaan pilihan," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dalam kesempatan yang sama,

Nurul Arifin juga mengapresiasi TNI yang telah membantu Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam menjaga keamanan Pemilu serentak pada 14 Februari lalu. Ia menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan aman, kondusif dan relatif tidak ada konflik.

"Apresiasi dan terima kasih kami Pak dengan berjalannya Pilpres, Pemilu, secara aman kondusif dan relatif tidak terjadi tidak ada konflik begitu. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerja keras bapak-bapak sekalian di TNI," ungkapnya.

— **bia/aha**

”
APRESIASI DAN TERIMA KASIH KAMI PAK DENGAN BERJALANNYA PILPRES, PEMILU, SECARA AMAN KONDUSIF DAN RELATIF TIDAK TERJADI TIDAK ADA KONFLIK BEGITU. KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH UNTUK KERJA KERAS BAPAK-BAPAK SEKALIAN DI TNI.



FOTO: ENO/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dalam foto bersama usai mengikuti Rapat Kerja dengan Panglima TNI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).



Scan QR untuk berita selengkapnya

Revisi UU Penyiaran Akomodir Perkembangan Teknologi

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai bahwa UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang eksis saat ini belum mengakomodasi perkembangan teknologi terbaru. Maka dari itu, revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ini, menurutnya, menjadi suatu hal yang urgen. Terlebih, revisi UU ini telah tertunda sejak awal 2000.

"UU penyiaran yang disahkan pada tahun 2002 belum mengakomodasi perkembangan teknologi saat ini. Sejak tahun 2011 atau 2012, upaya revisi terus berjalan tanpa titik terang," kata Dave usai diskusi Forum Legislasi yang bertajuk 'Menuju Era Baru, RUU Penyiaran Perlu Ikuti Kemajuan Teknologi' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).

Dave menyoroti bahwa aturan penyiaran yang ada saat ini pengaturannya masih kurang memadai terkait transformasi digital. "Meskipun layanan *streaming* dan media sosial berkembang pesat, regulasi yang ada belum mampu menangkap dinamika yang terjadi," ucap dia.

Dave menegaskan perlunya regulasi yang ketat untuk melindungi nilai-nilai lokal dari budaya-budaya luar yang merusak. "Kita harus memiliki otoritas yang kuat untuk mengatur konten yang disajikan kepada masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai contoh, dirinya menjelaskan seperti beberapa media penyiaran digital yang kontennya

menyebarkan ideologi LGBT yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia. Maka dari

itu media asing harus mendapat pengawasan dari negara dan KPI.

la juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan industri dalam menjaga kewibawaan informasi. "Kerja sama yang solid antara semua pihak adalah kunci untuk menjaga integritas dan pemahaman yang tepat tentang identitas dan nilai-nilai negara kita," tutupnya. — hal/rdn

”

UU PENYIARAN YANG DISAHKAN PADA TAHUN 2002 BELUM MENGAKOMODASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAAT INI. SEJAK TAHUN 2011 ATAU 2012, UPAYA REVISI TERUS BERJALAN TANPA TITIK TERANG.



FOTO: AFR/PDI

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat mengikuti diskusi Forum Legislasi yang bertajuk 'Menuju Era Baru, RUU Penyiaran Perlu Ikuti Kemajuan Teknologi' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tindak Tegas Oknum ASN BPN yang Curang

Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin menegaskan, oknum ASN di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan kecurangan dan pungli harus ditindak tegas. Supaya ada efek jera dan bisa menjadi contoh untuk oknum-oknum di daerah lain.

"Prosedur harus ditindak kalau misalnya ada ASN yang berbuat sedemikian itu ketahuan, ditindak tegas kalau perlu dicabut ASN-nya supaya ada rasa jera," ujar Rosi usai Rapat dengan BPN di ruang Rapat Hotel Aston Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (20/3).

Rosi mendapatkan laporan Dari masyarakat bahwa selama ini jika mereka ingin mengurus validasi Dari sertifikat mereka, mereka harus bayar Dan untuk jangka

waktu penyelesaiannya tergantung Dari nominal yang diberikan oleh masyarakat tersebut.

"Setiap kita mau kredit ada cek validasi sertifikat, ada cek keaslian sertifikat itu bayar, kalau misal kita bayar dengan nominal sekian, bisa satu hari, bisa seminggu, bisa sebulan tergantung berapa nominal yang kita kasih kepada BPN," ujar Rosi.

Menurut Rosi perlu adanya reformasi di dalam BPN dan reformasi

untuk SOP dalam penerbitan sertifikat dalam pengecekan dan dalam pengalihan hak dan sebagainya.

"Padahal kalau perusahaan swasta ada sedikit saja kesalahan, peringatan pertama, kedua, ketiga dipecat, Kenapa ASN tidak bisa dipecat? mestinya ASN itu harus ditindak tegas, Kalau memang dia berbuat kesalahan satu kali dua kali tiga kali ya udah dicabut saja ASN-nya, banyak calon-calon asisten yang punya karakter yang bermoral," kata Rosi. **eno/aha**

”

SETIAP KITA MAU KREDIT ADA CEK VALIDASI SERTIFIKAT, ADA CEK KEASLIAN SERTIFIKAT ITU BAYAR, KALAU MISAL KITA BAYAR DENGAN NOMINAL SEKIAN, BISA SATU HARI, BISA SEMINGGU, BISA SEBULAN TERGANTUNG BERAPA NOMINAL YANG KITA KASIH KEPADA BPN.



FOTO: ENO/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin saat mengikuti Rapat dengan BPN di ruang Rapat Hotel Aston Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (20/3/2024).



Tanah Tak Bertambah, Tapi Kebutuhannya Terus Bertambah

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa luas bidang tanah tidak pernah bertambah. Tapi, kebutuhan akan tanah dari waktu ke waktu terus meningkat.

"Terkait tanah selalu menjadi persoalan klasik yang sulit untuk kita hindari. Kita lihat saja kebutuhan negara, industri (swasta), serta

kepentingan individu yang dari waktu ke waktu perlu melakukan pembangunan. Ditambah jumlah penduduk juga terus meningkat,



TERKAIT TANAH SELALU MENJADI PERSOALAN KLASIK YANG SULIT UNTUK KITA HINDARI. KITA LIHAT SAJA KEBUTUHAN NEGARA, INDUSTRI (SWASTA), SERTA KEPENTINGAN INDIVIDU YANG DARI WAKTU KE WAKTU PERLU MELAKUKAN PEMBANGUNAN.

maka kebutuhan akan tanah juga bertambah," tuturnya saat ditemui se usai rapat di Kantah BPN, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (20/3).

Saan juga menegaskan supaya Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan persoalan bidang tanah yang belum terdaftar. "Dari paparan tadi, kita bisa melihat perkiraan jumlah tanah di Kepulauan Riau mencapai kurang lebih 905.593 bidang, dan yang baru terdaftar 769.346 bidang atau sekitar 84,95%. Sedangkan yang belum terdaftar 136.247 bidang atau sekitar 15,15%," tuntas Saan.

Saan berharap bahwa apa yang menjadi prioritas program pertanahan ini dapat terselesaikan dan tercapai dengan baik. "Pada prinsipnya, jangan menyulitkan masyarakat, karena masyarakat berhak mendapat keadilan atas tanahnya. Selain itu juga yang terpenting ialah memperoleh kepastian hukum," tutupnya.

dip/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



KIL KETUA KOMISI II DPR RI

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantah BPN, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (20/03/2024).

FOTO: ENO/PDT

Terminal Pakupatan Diimbau Permudah Akses Tiket Terjangkau

Harga tiket transportasi umum jelang Idul Fitri semakin meningkat hingga dua kali lipat dari hari-hari biasanya.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Tubagus Haerul Jaman saat meninjau Terminal Pakupatan di Serang, Banten, Rabu, (20/3) meminta operator transportasi yang ada di Terminal menjual tiket dengan tarif wajar alias terjangkau.

"Terminal Pakupatan perlu memberikan pelayanan penjualan tiket yang mudah diakses, serta tidak mematok harga terlalu tinggi. Cara itu diharapkan dapat menumbuhkan minat orang untuk mudik menggunakan bus daripada kendaraan motor yang rawan kecelakaan," tegas Tubagus usai tinjauan.

Adapun terkait kemudahan penjualan tiket, Legislator Dapil Banten II tersebut mengimbau Terminal Pakupatan untuk membuka akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Diharapkan melalui terobosan tersebut, menjadi salah satu solusi mitigasi adanya lonjakan jumlah pembelian tiket.

"Tiket ini juga nanti, di Terminal sini agar tidak ada lonjakan ketika menghadapi Lebaran, masyarakat bisa membeli tiket yang wajar dan masyarakat lebih mudah lagi. Apakah melalui tiket online atau datang kesini untuk tiket angkutan Lebaran ini," usul Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Komisi

”

TERMINAL PAKUPATAN PERLU MEMBERIKAN PELAYANAN PENJUALAN TIKET YANG MUDAH DIAKSES, SERTA TIDAK MEMATOK HARGA TERLALU TINGGI. CARA ITU DIHARAPKAN DAPAT MENUMBUHKAN MINAT ORANG UNTUK MUDIK MENGGUNAKAN BUS DARIPADA KENDARAAN MOTOR YANG RAWAN KECELAKAAN,

V DPR RI menekankan pentingnya kekompakan Pemerintah dalam menangani mudik Lebaran. Lonjakan jumlah pemudik yang diperkirakan mencapai 190 juta orang perlu disikapi dengan tepat sehingga angka kecelakaan dapat diminimalisir. (go/aha) — hal/rdn



FOTO: GER/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Tubagus Haerul Jaman saat meninjau Terminal Pakupatan di Serang, Banten, Rabu, (20/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Permasalahan Jalan Lubang dan Truk ODOL Harus Tuntas

Mudik secara historis merupakan sebuah interaksi sosial masyarakat yang diselenggarakan pada saat jelang Hari Raya Idul Fitri. Khususnya di Indonesia, mudik menjadi sebuah tradisi yang dilembagakan. Oleh karena itu, maka diharapkan kegiatan mudik tersebut harus lebih baik dari tahun ke setiap tahunnya.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi saat hadir sebagai salah satu narasumber diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman" yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

"Karena hampir setiap tahun kita melakukan mengevaluasi dan memperbaiki, sehingga mudik itu diharapkan lebih baik. Bicara tentang mudik, itu sudah pasti ada pelakunya yang mudik, kemudian apa transportasinya. Bicara alat transportasi adalah ada dua pendekatannya, pendekatannya adalah keamanan dan kenyamanan," ujar Fauzi.

Bicara alat transportasi, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyoroti permasalahan jalan berlubang yang masih banyak ditemukan di beberapa wilayah sehingga menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Fauzi menyangkan masih cukup banyak jalan-jalan yang harus diperbaiki oleh pemerintah jelang Lebaran ini.

"Memang kalau masalah jalan, kita masih banyak pendekatannya kepada bagaimana membuat jalan dibanding daripada memelihara jalan.

Biaya pemeliharaan jalan sangat rendah sekali, padahal kalau itu dialokasikan secara maksimal maka saya yakin pembiayaannya akan lebih murah dibanding kita membuat jalan

baru atau memperbaiki secara total," tutur Fauzi.

Oleh karena itu, Fauzi menegaskan pemeliharaan jalan harus juga dikedepankan oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan. Legislator Dapil Sulawesi Selatan III tersebut mengingatkan Pemerintah jangan hanya bicara tentang perbaikan jalan hanya pada saat menjelang lebaran saja. ➡ pun/aha

”

KARENA HAMPIR SETIAP TAHUN KITA MELAKUKAN MENGEVALUASI DAN MEMPERBAIKI, SEHINGGA MUDIK ITU DIHARAPKAN LEBIH BAIK. BICARA TENTANG MUDIK, ITU SUDAH PASTI ADA PELAKUNYA YANG MUDIK, KEMUDIAN APA TRANSPORTASINYA.



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi saat menjadi narasumber pada diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Desak Kementerian BUMN Ambil Langkah Serius Soal Pangan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN untuk lebih serius dan proaktif ikut berperan mengatasi kelangkaan pangan, utamanya beras di pasaran. Pasalnya, Aria Bima menilai BUMN memiliki semua unsur usaha di bidang pangan dari hulu hingga hilir.

"Kita tidak ingin seperti

”

KITA TIDAK INGIN SEPERTI TEMAN-TEMAN KATAKAN (BUMN) MENJADI PEMADAM KEBAKARAN. ADA PERAN BULOG, ADA PERAN PT PUPUK, KEMUDIAN ADA PERAN DARI ID FOOD DAN JUGA DARI PERAN PTPN.

teman-teman katakan (BUMN) menjadi pemadam kebakaran. Ada peran Bulog, ada peran PT Pupuk, kemudian ada peran dari ID Food dan juga dari peran PTPN," ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta semua BUMN melalui kolaborasi di Kementerian BUMN dan berbagai pihak, tidak lepas begitu saja menghadapi permasalahan pangan akhir-akhir ini. Sebab, peran kuat intervensi pemerintah dalam hal ini melalui BUMN, dinilai penting sebagai *leading sector* dalam ketahanan pangan.

"Ada kecenderungan kalau *state capital* tidak *leading* maka permainan pemburu rente

"Komisi VI mendesak kepada Kementerian BUMN untuk benar-benar mencermati dan mengambil langkah-langkah yang serius untuk pengamanan, terutama cadangan beras nasional. Ada kecenderungan kalau *state capital* tidak *leading* maka permainan pemburu rente memanfaatkan situasi yang ada," jelasnya.

Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan, Rabu (13/3) lalu, Komisi VI mendesak pemerintah agar memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok. Kemendag diminta agar mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan.

bia/rdn



FOTO: ENO/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wirausaha Baru Perlu Dapat Perhatian dari Kemenkop-UKM

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto meminta Kementerian Koperasi dan UKM memberikan perhatian lebih kepada wirausaha-wirausaha baru. Menurutnya, tidak semua wirausaha baru dapat terus bertahan untuk menjalani proses bisnisnya. Oleh sebab itu, peran Kemenkop-UKM dinilai penting.

"Menurut saya Kementerian Koperasi dan UKM juga harus lihat tingkat kesuksesan dari wirausaha-wirausaha baru di Indonesia secara umum seperti apa. Apa yang menjadi faktor utama dari kegagalan wirausaha baru, apakah itu di pendanaan, di penjualan, dan lain sebagainya," ujarnya kepada Menteri Koperasi dan

”

MENURUT SAYA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM JUGA HARUS LIHAT TINGKAT KESUKSESAN DARI WIRAUSAHA-WIRAUSAHA BARU DI INDONESIA SECARA UMUM SEPERTI APA. APA YANG MENJADI FAKTOR UTAMA DARI KEGAGALAN WIRAUSAHA BARU, APAKAH ITU DI PENDANAAN, DI PENJUALAN, DAN LAIN SEBAGAINYA.

UKM Teten Masduki dalam Raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Adi menegaskan pihaknya memahami dan mengerti bagaimana wirausaha-wirausaha baru berjalan. Karena itu, penting untuk dimengerti Kemenkop-UKM agar ke depan program-program yang dibuat dapat benar-benar bermanfaat. "Sehingga dalam membuat program untuk membantu UKM itu lebih tepat dan lebih terarah," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebagai informasi, menurut data dari Kemenkop UKM, jumlah wirausaha baru di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebanyak 821.666 wirausaha. Sementara itu, hingga tahun 2023 Kemenkop dan UKM telah melakukan pendataan lengkap kepada 13,4 juta data Koperasi dan UMKM. ➡ [bis/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto saat mengikuti rapat dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Raker di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

FOTO: OJI/PDI

Rawan Kemacetan Arus Mudik, Pertamina Perlu Siagakan SPBU

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris meminta Pertamina memperhatikan titik rawan kemacetan sepanjang jalur mudik. Sebab diketahui, Pertamina telah menyiapkan langkahnya dibentuknya satgas-satgas maupun SPBU mini mobile yang bisa melayani pada titik-titik kemacetan.

"Memang yang perlu diantisipasi adalah daerah seperti Jawa dan kota-kota besar di luar Jawa. Termasuk Sulawesi Selatan dan Bali yang juga merupakan titik-titik rawan. Kelihatannya untuk di SPBU sendiri

stok yang ada cukup untuk bertahan. Setiap hari memang terus dipantau oleh Pertamina agar mampu memenuhi kebutuhan, khususnya untuk daerah yang menjadi titik-titik

”

MEMANG YANG PERLU DIANTISIPASI ADALAH DAERAH SEPERTI JAWA DAN KOTA-KOTA BESAR DI LUAR JAWA. TERMASUK SULAWESI SELATAN DAN BALI YANG JUGA MERUPAKAN TITIK-TITIK RAWAN.

mudik," kata Andi Yuliani Paris di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/3).

Terkait LPG, ia juga mendapatkan informasi bahwa Pertamina telah menambah stok untuk LPG pada beberapa wilayah di Indonesia, baik Indonesia Barat, Tengah, maupun Timur. Termasuk di Sulawesi Selatan ada sekitar 200 ribu tambahan stok LPG 3kg.

Soal listrik, Andi Yuliani Paris memperhatikan masalah pohon tumbang saat sedang musim hujan. Ia berpesan agar jangan sampai listrik mati di Ramadan ini. "Dengan matinya arus listrik tentu berpengaruh kepada operasional SPBU, rest area, dan juga rumah ibadah seperti masjid dan musholla akan terdampak dengan kejadian mati listrik ini. Hal ini harus diantisipasi," tegasnya.

Disamping itu ia pun berharap agar Pertamina juga bisa mengantisipasi kebutuhan BBM untuk transportasi laut. Karena banyak juga pemudik yang menggunakan transportasi laut. "Semua titik-titik tersebut harus juga diperhitungkan oleh Pertamina, bukan hanya di SPBU. Tampaknya sudah ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengantisipasi hal ini," urainya.

Tetapi yang paling penting, legislator ini pikir harusnya ada helikopter yang bisa memantau dari udara dimana terjadi kemacetan-kemacetan dan di titik-titik yang jarang atau susah ditemukan SPBU. "Ini penting juga untuk diperhatikan.

Kalau dipantau menggunakan helikopter besar kemungkinan bisa diketahui di mana titik-titik yang membutuhkan BBM," imbuhnya.

dep/aha



FOTO: DEP/PTD

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Satgas RAFI 2024 Pertamina Dinilai Siap Amankan BBM

Kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak (BBM) umumnya meningkat secara signifikan menjelang Idul Fitri. Prediksi survei mobilisasi masyarakat selama liburan Ramadan & Idul Fitri (RAFI) 2024 sebesar 193,6 juta secara total meningkat 56% dibanding tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan BBM tentunya terprediksi meningkat.

Kondisi ini menuntut Pertamina penyedia dan pendistribusi BBM untuk membentuk Satuan Tugas Ramadan & Idul Fitri (Satgas RAFI) 2024 guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM, begitu juga dengan LPG. Mencermati hal

tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud menyoroti langkah baik Pertamina, serta menilai stok dan penyaluran BBM serta LPG di daerah Sulawesi dalam kondisi aman dan berjalan dengan lancar.

"Yang saya soroti adalah bagaimana supaya stok itu aman, tentunya Pertamina juga sudah tahu apa kekurangan dan kelebihanannya.



YANG SAYA SOROTI ADALAH BAGAIMANA SUPAYA STOK ITU AMAN, TENTUNYA PERTAMINA JUGA SUDAH TAHU APA KEKURANGAN DAN KELEBIHANNYA. TENTUNYA SELAMA INI KAN SUDAH SERING DIEVALUASI PASTI TAHU LAH BAHWA PENAMBAHAN KUOTA SEKIAN-SEKIAN, ITU PASTI AMAN.

Tentunya selama ini kan sudah sering dievaluasi pasti tahu lah bahwa penambahan kuota sekian-sekian, itu pasti aman," ujar Rusda se usai melakukan Kunjungan Kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar, Rabu (20/3).

Sejalan dengan hal tersebut, pada pemaparan yang disampaikan oleh Direktur Pemasaran Regional Pertamina, Mars Ega Legowo Putra, dinyatakan bahwa Stok BBM dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 115 Terminal BBM, 30 Terminal LPG, lebih dari 7.400 SPBU, 723 SPBE, 5.027 Agen LPG, dan 71 DPPU.

Tidak hanya itu, Pertamina juga mengakomodasi permintaan layanan energi tambahan pada masa RAFI 2024. Diantaranya pelayanan SPBU Siaga di wilayah jalur potensial, Agen LPG Siaga 24 jam di wilayah yang permintaannya tinggi, Mobil tangki siap sedia sebagai cadangan suplai BBM dan lainnya.

Rusda mengatakan bahwa Komisi VII DPR bersama pihak-pihak terkait akan terus melakukan pengawasan terkait stok dan pendistribusian BBM dan LPG selama RAFI 2024. "Jadi memang tadi sudah ada aturannya MoU antara Kepolisian dengan Komisi VII dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pengawasan," pungkasnya.

Dengan begitu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berharap Masyarakat Indonesia yang merayakan Ramadan dan Idul Fitri nantinya dapat melakukan ibadah dengan khusyuk, tenang, dan aman, tanpa harus mengkhawatirkan soal ketersediaan stok BBM dan LPG.

— ysm/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud saat mengikuti Kunjungan Kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar, Rabu (20/3/2024).

FOTO:YSM/PDT

Komisi VIII Setujui Pembicaraan Tingkat I RUU KIA

Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan Komisi VIII DPR RI menyetujui pembicaraan tingkat I RUU (Rancangan Undang-Undang) Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, seluruh Fraksi yang hadir (Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN,

”

SELURUH FRAKSI YANG ADA DI KOMISI VIII DPR RI MENYETUJUI RUU IBU DAN ANAK DALAM FASE 1.000 HARI PERTAMA AWAL KEHIDUPAN UNTUK SELANJUTNYA DIBAWA DALAM RAPAT PARIPURNA UNTUK KEMUDIAN DISAHKAN.

Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP), telah menyetujui pembicaraan tingkat I RUU Ibu dan Anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan untuk selanjutnya dibawa dalam pembicaraan tingkat II Rapat Paripurna.

“Seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI menyetujui RUU Ibu dan Anak dalam fase 1.000 hari pertama awal kehidupan untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan,” kata Ashabul Kahfi dalam keterangannya kepada **Parlementaria** di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/3).

Nantinya, dengan disahkannya RUU Ibu dan Anak diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Oleh karena itu, RUU KIA hadir untuk meminimalkan beban-beban yang selama ini dirasakan perempuan.

“RUU KIA dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak khususnya pada fase 1000 awal kehidupan,” pungkasnya. Sebagaimana dimaksud, nantinya cuti melahirkan akan berlaku hingga 6 bulan dan berhak mendapatkan upah secara penuh hingga 4 bulan dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Selanjutnya cuti suami juga akan diberikan hingga 2 hari untuk menjaga kesehatan istri dan anak. Kemudian setiap anak yang baru lahir wajib mendapatkan pendampir air susu ibu sesuai standar hingga 6 bulan, mendapatkan jaminan gizi dan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. **tn/aha**



FOTO: MARI/PDI

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Negara Harus Hadir di Tengah Penderitaan Rakyat

Komisi VIII DPR RI mengawasi penyaluran bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah pasca banjir menyerang daerah ini. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, bantuan bagi korban bencana harus terus dilanjutkan sehingga negara tidak absen dan tetap hadir di tengah penderitaan rakyat.

Dalam kunjungannya, Komisi VIII menyoroti soal layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti logistik, permakanan, hunian, layanan psikososial, dan lain sebagainya. Abdul Wachid juga sempat mengomentari soal ramai di media sosial soal keluhan bantuan pemerintah pusat yang tak kunjung datang untuk korban banjir di Jawa Tengah. Pasalnya, pemberian bantuan sosial (bansos) gencar kepada masyarakat Jawa Tengah sebelum

Pilpres dan Pileg berlangsung pada Februari 2024 lalu.

Atas keluhan itu, Wachid menilai penting bagi pihaknya untuk merespon hal tersebut. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan bantuan sebesar

”

SAYA BACA DAN MELIHAT DI TIKTOK, BICARANYA KALAU DULU SEBELUM PILEG DAN PILPRES ADA SEGERA BANTUAN. SEKARANG INI PILPRES DAN PILEG SUDAH SELESAI, SEDANGKAN BANJIR 3 SAMPAI 4 HARI BELUM ADA BANTUAN,

Rp3 miliar untuk menangani banjir di Jawa Tengah. Adapun alasannya mengadakan Kunjungan Kerja spesifik ini tak lain sebab banjir selalu menjadi agenda tahunan di wilayah utara Jawa Tengah.

"Saya baca dan melihat di TikTok, bicaranya kalau dulu sebelum Pileg dan Pilpres ada segera bantuan. Sekarang ini Pilpres dan Pileg sudah selesai, sedangkan banjir 3 sampai 4 hari belum ada bantuan," ungkap Wachid di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (20/3).

Dalam kesempatan kunjungan ini Komisi VIII juga menyoroti soal penanganan pasca bencana merupakan hal yang tidak kalah pentingnya, kerusakan berbagai sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat mencakup dampak psikologis, kerugian ekonomi dan sosial yang penanganannya harus dilaksanakan bersama-sama. **— ssb/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir secara simbolis di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (20/3/2024).

FOTO: EKO/PDI

Peran BPOM dan Dinkes Krusial

Selama Ramadan ini, Komisi IX DPR RI rajin memantau pasar-pasar tradisional untuk memastikan tidak ada produk makanan yang mengandung bahan berbahaya. Peran BPOM dan dinas kesehatan sangat krusial untuk terus mengawasi produk dagangan pasar dari kandungan formalin atau boraks.

Di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3), delegasi Komisi IX dipimpin Emanuel Melkiades Laka Lena melihat dari dekat produk-produk makanan yang dijual. Beberapa produk yang diperdagangkan di pasar diambil sampelnya secara acak dari beberapa kios. Misalnya, ada donat

warna-warni, ayam potong, kerupuk, kunyit giling, dan lain-lain. Sampel itu kemudian diserahkan ke mobil BPOM yang beroperasi di pasar tersebut.

"Peran BPOM dan Dinkes Bogor

”

PERAN BPOM DAN DINKES BOGOR SANGAT PENTING DALAM MEMASTIKAN SEMUA MAKANAN YANG DIJUAL DI PASAR YANG DIKELOLA PEMDA KABUPATEN BOGOR INI DI CIBINONG...

sangat penting dalam memastikan semua makanan yang dijual di pasar yang dikelola Pemda Kabupaten Bogor ini di Cibinong, sudah melewati proses produksi dan distribusi yang aman dari bahan-bahan bahaya," kata Melki yang juga Wakil Ketua Komisi IX tersebut.

Ia mengapresiasi peran Dinkes dan BPOM Bogor yang sudah bekerja sangat baik dalam mengawasi setiap produk makanan yang beredar di Pasar Cibinong. Politisi Partai Golkar itu menyerukan, agar BPOM Bogor mengawasi proses produksi makanan sebelum didistribusikan ke pasar-pasar. Produsen makanan yang ketahuan menggunakan formalin, agar dicabut izin usahanya dan diproses hukum. — mh/aha



FOTO: MH/PDT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengecek produk-produk makanan yang dijual Di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Cek Keamanan Pangan Pasar Depok Jaya

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI turut memberikan apresiasi atas upaya pengawasan yang ketat terhadap peredaran makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat selama bulan Ramadan di Depok, Jawa Barat. Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufida mengatakan pentingnya peran pemerintah daerah beserta jajarannya dalam menjaga keamanan produk makanan maupun minuman.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah beserta BPOM

dalam memastikan keamanan produk yang beredar di Pasar Depok Jaya ini," katanya di Pasar Depok Jaya, Jawa Barat, Kamis (21/3). Selain pengawasan, ia juga meminta pemerintah daerah dan jajarannya melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual produk dengan menggunakan bahan yang berbahaya.

"Secara umum semua makanan dan minuman yang dijual disini aman untuk dikonsumsi. Kunjungan kami ke Pasar Depok Jaya bukan sekadar pengawasan, melainkan

bentuk nyata dukungan kami terhadap industri makanan lokal. Bahkan, kami (Komisi IX) juga turut berbelanja disini mulai dari kue untuk takjil, tahu hingga ikan asin," ujarnya.

Meskipun secara umum produk makanan terjamin, Mufida juga mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan terkait adanya formalin pada mie basah. Namun, berkat pengawasan langsung dan pengujian menggunakan rapid test kit, dipastikan makana tersebut sudah dimusnahkan dan pembinaan terhadap pedagang penjual produk tersebut pun telah dilakukan.

— mm/aha



FOTO:RIA/PDI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufida saat melakukan pengecekan terhadap produk-produk makanan yang dijual di Pasar Depok Jaya, Jawa Barat, Kamis (21/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Implementasi UU Pemajuan Kebudayaan, Fokus Bahasa Daerah

Tim Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kota Serang, Banten. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya mengenai objek pemajuan kebudayaan bahasa.

Ketua Tim Komisi X Djohar Arifin Husin menjelaskan tujuan dari Kunsfik ini adalah untuk mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan masyarakat di Kota Serang terkait kendala dan perkembangan bahasa daerah. Sebab, salah satu implikasi positif dari lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Indonesia saat ini telah memiliki strategi kebudayaan yang diterbitkan melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.

"Selain itu, dalam APBN juga telah dicantumkan 3 mengenai dana abadi kebudayaan. Dengan adanya strategi kebudayaan dan dana abadi kebudayaan tersebut, menjadi suatu langkah maju dalam menerjemahkan sekaligus melaksanakan amanat konstitusi untuk memajukan kebudayaan di Indonesia," jelas Djohar saat membuka pertemuan di Kantor Wali Kota Serang, Banten, Kamis (21/3).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan implikasi lain dari adanya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah setiap daerah

baik provinsi maupun kabupaten/kota diamanatkan untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), yang harus melibatkan para pemangku kepentingan kebudayaan di daerah.

"Penyusunan PPKD ini merupakan suatu langkah sistematis dalam kerangka perencanaan

”

PENYUSUNAN PPKD INI MERUPAKAN SUATU LANGKAH SISTEMATIS DALAM KERANGKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DILAKSANAKAN BERJENJANG MULAI DARI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, PROVINSI HINGGA NASIONAL.

pembangunan bidang kebudayaan yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional," jelasnya.

Dalam dokumen PPKD Provinsi Banten, disebutkan bahwa bahasa daerah yang berkembang di Kota Serang yaitu Bahasa Sunda dialek Banten. Bahasa Sunda dialek Priangan, Bahasa Jawa dialek Banten dan aksara pegon. Adapun bahasa daerah yang kurang berkembang yaitu Aksara Sunda Hanacaraka, dan Aksara Sunda Ngalagena. **— rdn**

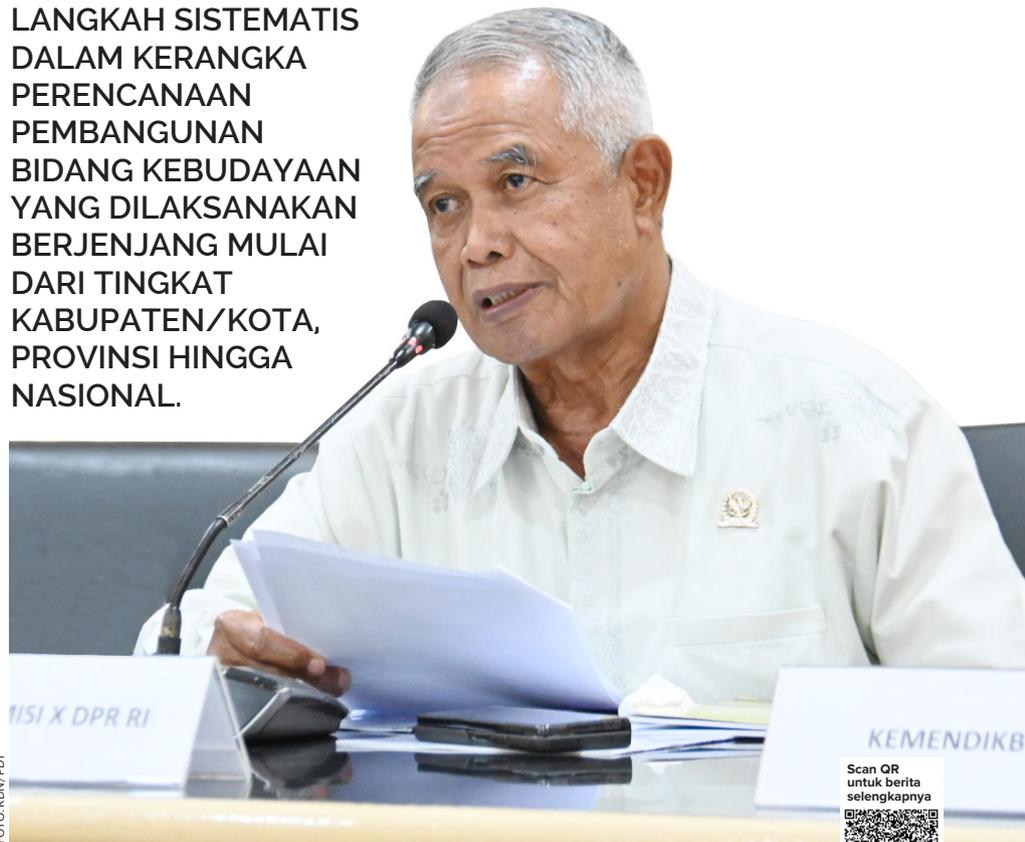


FOTO: RDN/PDT

Ketua Tim Komisi X Djohar Arifin Husin saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kota Serang, Banten.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Dinilai Belum Serious Lindungi Bahasa Daerah

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai pemerintah belum cukup serius dalam mengembangkan, menjaga atau melindungi bahasa daerah. Menurutnya, bahasa daerah merupakan ciri khas dan karakter asli dari bangsa Indonesia.

"Bagi saya (pemerintah) segera lakukan gerakan untuk membumikan bahasa daerah menjadi bahasa pendamping dari bahasa Indonesia. Jadi harus begitu. bahasa Indonesia harus didampingi dengan bahasa daerah, tidak bisa dia berjalan sendiri," ujar Purnamasidi ketika ditemui tim **Parlementaria** usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Surakarta, Kamis (21/3).

Ia mengungkapkan usulan untuk menjadikan bahasa daerah ini

masuk ke muatan lokal di mata mata pelajaran yang diterima komisi X DPR RI ketika melakukan kunjungan kerja spesifik di Kota Surakarta merupakan usulan yang strategis.

Ia optimistis dan yakin waktu 9 tahun itu cukup untuk membangun karakter dan membangun penguasaan bahasa daerah yang yang memupuni di anak anak

”

BAGI SAYA (PEMERINTAH) SEGERA LAKUKAN GERAKAN UNTUK MEMBUMIKAN BAHASA DAERAH MENJADI BAHASA PENDAMPING DARI BAHASA INDONESIA.

Indonesia. Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang telah memiliki pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) sejak tahun 2018 (Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 430/47.5 Tahun 2018). Dalam dokumen PPKD Kota Surakarta dicantumkan 17 objek pemajuan kebudayaan salah satunya bahasa.

Diketahui, Bahasa ibu yang digunakan oleh masyarakat kota Surakarta pada umumnya adalah Bahasa Jawa yang meliputi hierarki ketata-bahasa : 1. Bahasa Jawa Ngoko 2. Bahasa Jawa Krama Madya 3. Bahasa Jawa Krama Inggil 4. Bahasa Jawa Krama Ndesa 5. Bahasa Jawa Kedhatonan. Maka dari itu, Kunjungan Komisi X DPR RI dilaksanakan guna memantau langsung bagaimana upaya pemerintah kota Surakarta dalam melindungi budaya bahasa Jawa.

hal/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (21/3/2024).

FOTO:HAL/PDT

Usul BI Jalin Kerja Sama Gelar Layanan Tukar Uang Kecil

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengusulkan agar Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan layanan publik serta toko ritel untuk penukaran uang pecahan kecil yang biasa dilakukan masyarakat saat menjelang hari raya. Menurutnya, pemanfaatan jaringan toko ritel dapat dilakukan lantaran sebarannya yang terdapat di hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia.

"Kalau bisa Bank Indonesia juga bekerja sama dengan layanan-layanan publik lainnya misalnya SPBU, misalnya layanan ritel yang hampir di setiap kabupaten/kota layanan ritel itu ada," ujar Politisi yang akrab disapa Samad ini usai menghadiri acara Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman" di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (21/3).

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini mendorong Bank Indonesia agar proaktif melakukan terobosan dalam penukaran uang layak edar pecahan kecil dalam rangka Idulfitri 2024. Terlebih, menurutnya animo masyarakat

untuk melakukan mudik lebaran akan melonjak seiring tidak ada lagi pembatasan perjalanan akibat Covid-19 seperti beberapa tahun lalu.

Legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga mengimbau BI agar menyiapkan layanan berjalan yang bisa berpindah lokasi menghampiri masyarakat. Ia berharap BI dapat menambah armada layanan berjalannya serta menambah persediaan uang kecil layak edar yang akan didistribusikan.

"Saya mengimbau Bank Indonesia menyiapkan layanan mobile yang bisa dari satu lokasi ke lokasi lain khususnya di pusat-pusat keramaian untuk penukaran uang kecil. Armatanya (memang) ada, cuma masih terbatas kalau bisa ditambah. Penyediaan volume persediaannya

juga harus disiapkan lebih besar. Kenapa? karena ini animo masyarakat mudik tanpa Covid ini cukup besar," tuturnya.

Menutup pernyataannya, Samad juga berpesan kepada masyarakat agar melakukan penukaran uang pada tempat-tempat resmi yang telah disediakan. Hal ini menghindari beban biaya atau pemotongan nilai penukaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuka jasa penukaran tak resmi. **uc/rdn**

FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad saat menjadi narasumber acara Diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (21/3/2024).



Tausiah di 'Ramadhan Ngantor', Tetap Utamakan Etos Kerja

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai acara 'Ramadhan Ngantor' yang diinisiasi oleh Biro Pemberitaan Parlemen menjadi simbol bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Pegawai Biro Pemberitaan Parlemen untuk tetap mengutamakan etos kerja meski tengah berada di bulan Ramadan.

"Acara ini justru menegaskan bahwa Ramadan itu justru adalah bulan dimana etos kerja kita harus terlihat. Ini poin terpenting, karena kalau kita lihat sejarah Nabi, maka hampir seluruh peperangan Nabi di bulan Ramadan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ini menjadi kata kuncinya, etos kerja itu harus terlihat di Ramadan, sehingga

'Ramadhan Ngantor' menjadi poin penting mengikuti Rasulullah SAW," kata Maman usai mengikuti acara 'Ramadhan Ngantor' di Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Maman yang dalam kegiatan 'Ramadhan Ngantor' kali ini juga turut memberikan tausiyahnya, mengapresiasi pola kegiatan menjelang buka puasa ini. Menurutnya, kegiatan dihadirkan tidak monoton namun juga tetap bermakna dan penuh manfaat.

"Di sini beda, ada kemasan dimana MC, lalu pengisi acara, terus tata letak panggung, ini betul-betul membuat nggak boring gitu, sehingga menghadirkan anak yatim pun tidak pada kontak anak yatim kayak mau dijejerin, mau dipamerin, tapi mereka dilibatkan, mereka

dilibatkan bahwa kita membutuhkan doa-doa anak-anak yatim itu," kata Politisi Fraksi PKB ini.

Legislator Dapil Jawa Barat IX ini berharap usai kegiatan 'Ramadhan Ngantor' ini, dapat berdampak baik pada iklim kerja di lingkungan Setjen DPR RI selama bulan Ramadan.

"Saya rasa akan berpengaruh besar ya acara-acara seperti ini karena membangkitkan juga nilai kegotong royongan, termasuk juga tadi ceramah saya mewakili teman-teman yang nunggu THR dan lain sebagainya. Saya yakin pola seperti ini ya akan membuat kita bisa keluar dari rutinitas, keluar dari kegiatan yang formal dan lain sebagainya. Ini menjadi obat terbaik kita untuk lalu nanti bekerja keras dengan etos kerja yang baik," pungkasnya. [we/aha](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat mengikuti acara 'Ramadhan Ngantor' di Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Foto: GJI/PDI

Zona Integritas Signifikan dengan Reformasi Birokrasi

Zona Integritas (ZI) sangat erat kaitannya dengan Reformasi Birokrasi (RB) dalam suatu institusi, salah satunya di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Oleh karena pentingnya ZI itulah, Setjen DPR RI secara resmi menggelar Sosialisasi ZI. Terlebih, pengaturan tentang zona integritas telah sangat rinci diatur sebagaimana tertuang dalam SK Sekjen Nomor 396 terkait pengaturan tentang zona integritas yang sangat rinci diatur.

"Karena nilai ZI ke RB sangat signifikan terkait dengan indeks-indeks yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI itu sangat menentukan. Jadi kalau ZI-nya baik, maka RB kita juga akan baik. Jadi integritas itu sangat diperlukan," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Helmizar saat menerangkan pentingnya Sosialisasi ZI yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).

Lebih lanjut, mengenai 5 unit kerja yang telah mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai perwujudan ZI, Helmizar

mengungkapkan pihaknya tidak berpuas diri dan justru akan terus dievaluasi. Bahkan tak ingin berhenti sampai disitu, Helmizar lantas mengusulkan adanya 8 unit kerja di Setjen DPR RI yang disiapkan untuk menuju ZI dan WBK.

Adapun bentuk *evidence*, ungkap Helmizar, yakni terkait dengan indeks-indeks di Setjen DPR RI yang seluruhnya terdapat 20 penanggung jawab. "Dan itu selalu dievaluasi oleh intern maupun oleh Kemenpan-RB. Adapun untuk teknisnya,

unit kerja yang ditunjuk sebagai Zona Integritas, mereka sudah mempersiapkan semua-semuanya yang diatur dalam SK Sekjen Nomor 396," pungkasnya.

Turut hadir dalam Sosialisasi ZI tersebut antara lain Inspektur I Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Inspektur II Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi dan segenap perwakilan masing-masing unit kerja Biro yang ada di lingkup Setjen DPR RI. **pun/aha**



Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI, Helmizar saat memimpin Sosialisasi ZI yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).



Scan QR untuk berita selengkapnya



Apresiasi Kekritisan Mahasiswa Program 'Magang di Rumah Rakyat'

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul mengapresiasi para mahasiswa peserta program Kampus Merdeka 'Magang di Rumah Rakyat' yang kritis terhadap berbagai hal yang terjadi di DPR. Salah satu aspek yang dikritisi mahasiswa magang tersebut adalah mengenai proses partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang. Sensi, sapaan akrabnya, menilai kekritisan yang muncul dari para mahasiswa ini menunjukkan bahwa mereka sebelumnya sudah banyak belajar terkait proses dan persoalan-persoalan yang ada di DPR.

"Kelihatan mereka sudah siap juga untuk mengikuti magang. Jadi mereka sudah bisa mengajukan pertanyaan yang memang sesuai

dengan persoalan yang ada di DPR. Dan berarti mereka sudah mulai belajar tentang DPR dan sudah menemukan masalah. Yang kedua juga pertanyaan juga memang kontekstual sesuai dengan apa yang terjadi di DPR," kata Sensi saat ditemui **Parlementaria** usai memberikan kuliah umum di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Dalam kuliah umum ini, setidaknya Sensi menjawab 20 pertanyaan dari para peserta Kampus Merdeka 'Magang di Rumah Rakyat', yang mana sebagian besar dari mereka menanyakan bagaimana proses partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di DPR.

"Bagi orang yang berada di luar gedung ini, pasti mereka bertanya ada apa sih di DPR itu. Dan mereka ingin tahu, wah ini kan ada

undang-undang yang berkaitan dengan nasib kami. Bagaimana caranya kami memberikan masukan dan bagaimana caranya mempengaruhi proses yang ada di DPR?. (Kekritisan) itu sangat manusiawi, kalau orang (luar) bicara tentang *public participation*," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Sensi berharap dengan diadakannya program Magang Di Rumah Rakyat ini, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa terkait berbagai hal tentang DPR. "Nah mudah-mudahan dengan penjelasan tambahan dari saya, mereka dapat lebih paham lagi terutama tentang peran dari Badan Keahlian. Yang kedua, juga persoalan-persoalan dihadapi dan apa *sih* sesungguhnya yang terjadi di DPR bisa mereka tahu dari situ sebenarnya," pungkasnya.

we/rdn

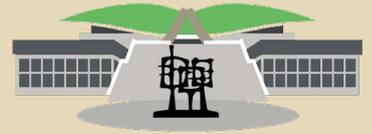


Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul dalam foto bersama usai kuliah umum di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: FHN/PDI



**Komisi V DPR RI meninjau
kesiapan fasilitas serta sarpras
di Terminal Bus Poris Plawad
untuk menghadapi
 arus mudik lebaran nanti.**

FOTO: MRI/PDT

